

Peran Strategis Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam Menopang Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia

Seri Wahyuni Harahap¹, Nadya Haryanti², Rifki Nand Putra Lubis³, Purnama Ramadani Silalahi⁴

^{1,2,3,4} Universitas Islam Negeri Sumatera

E-mail: seriwahyuniharahap06@gmail.com¹, nadyaharyanti63@gmail.com², rifkinandalubis@gmail.com³, purnamaramadani@uinsu.ac.id⁴

Article History:

Received: 31 Desember 2022

Revised: 25 Januari 2023

Accepted: 04 Februari 2023

Keywords: Berkelanjutan, Pembangunan, Pemerintah

Abstract: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran strategis pemerintah daerah provinsi sumatera utara dalam menopang pembangunan berkelanjutan di indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian analisis kualitatif deskriptif. Hasil yang didapat dari penelitian yaitu dengan adanya arahan oleh Presiden, maka peran strategis pemerintah daerah provinsi sumatera utara dalam menopang pembangunan berkelanjutan di indonesia dengan cara : 1) memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan dengan dengan meningkatkan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. 2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan melalui Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonisasi rencana pembangunan dan pemanfaatan ruang. 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, karena Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter

PENDAHULUAN

Dalam menghadapi keprihatinan global seperti kemiskinan, bencana alam, perubahan iklim, dan krisis keuangan, subjek pembangunan berkelanjutan, yang menekankan pada kombinasi antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan, merupakan tantangan yang sulit bagi pembuat kebijakan di semua negara. Tanpa komitmen dunia untuk mengubah pola pembangunan

tradisional, eksplorasi sumber daya alam dan lingkungan akan meningkat. Pembangunan ekonomi berbasis sumber daya alam yang tidak mengikutsertakan kelestarian lingkungan pada akhirnya akan memberikan pengaruh yang merugikan bagi lingkungan itu sendiri, karena sumber daya alam dan ekosistem memiliki daya dukung yang terbatas. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi yang mengabaikan potensi sumber daya alam dan lingkungan akan membawa tantangan pembangunan ke depan..(Ery, 2018) Salah satu persoalan besar yang dihadapi kemajuan ekonomi adalah bagaimana melaksanakan dan menikmati pembangunan tersebut secara terus-menerus atau berkelanjutan. Artinya, kegiatan ekonomi harus dapat hidup berdampingan dengan lingkungan untuk mencapai keseimbangan ekologis.

Indonesia telah menetapkan undang-undang untuk membatasi pergerakan orang dan barang, yang telah diatur oleh Pemerintah Pusat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, dengan pelaksanaan rinci diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020. Juga terjadi pergeseran komponen lingkungan, dengan kesehatan yang lebih diutamakan. Untuk membuat rencana pembangunan berdasarkan konsep pembangunan berkelanjutan, penting untuk terlebih dahulu memahami aspek-aspek apa saja yang diperlukan untuk pembangunan berkelanjutan, serta variabel dan instrumen apa saja yang diperlukan. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah benar-benar merinci komponen-komponen apa saja yang diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, baik pada tingkat pembangunan nasional maupun daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota). (Suparmoko, 2020)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Pada saat itu, pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan sudah masuk ke dalam kelompok negara-negara berpenghasilan menengah atas (upper-middle income countries) yang memiliki infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Peran Strategis Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Dalam Menopang Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia”

LANDASAN TEORI

Sustainable berasal dari kata “sustain” (melanjutkan) dan “able” (mampu). Secara sederhana, arti dari kedua istilah ini adalah kemampuan untuk melanjutkan. Dengan kata lain, keberlanjutan adalah kemampuan untuk melestarikan sumber daya melalui pengendalian penggunaan, pengembangan, dan konservasi sumber daya alam dan fisik. Development (Pembangunan) menurut Bryant dan White dalam (Suryono, 2010) adalah Upaya meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengendalikan masa depan mereka sendiri memiliki lima implikasi besar:

1. Pembangunan mensyaratkan tumbuhnya kapasitas manusia secara ideal, baik secara individu maupun komunitas (*Capacity*).
 2. Pembangunan memerlukan pembinaan pertumbuhan persatuan, persamaan cita-cita, dan kekayaan (*Equity*).
-

3. Pembangunan memerlukan pembentukan kepercayaan masyarakat untuk membantu individu tumbuh sesuai dengan potensi mereka (*Employment*).
4. Pembangunan memerlukan kemampuan memproduksi secara mandiri (*Sustainability*)
5. Pembangunan memerlukan penurunan ketergantungan satu negara pada negara lain (*Interdependence*)

Dalam strategi konservasi dunianya, International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) (1980) menyatakan bahwa untuk menjadi pembangunan berkelanjutan, pembangunan harus mempertimbangkan faktor lingkungan, sosial, dan ekonomi berdasarkan sumber daya hayati, serta baik keuntungan maupun kerugian jangka panjang. Jalur tindakan alternatif mungkin jangka panjang atau pendek.

Sedangkan menurut United States Environmental Protection Agency (USEPA), pembangunan berkelanjutan adalah suatu metode pembangunan yang dapat meningkatkan taraf ekonomi, menjaga kelestarian lingkungan, dan keadaan sosial untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang.

Sementara itu, dalam Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009, pembangunan berkelanjutan diartikan sebagai upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan kualitas hidup generasi sekarang dan mendatang. Berdasarkan pemahaman-pemahaman tersebut di atas, paradigma pembangunan yang semula berfokus pada kepentingan ekonomi kini telah bertransisi menjadi paradigma pembangunan yang mengakui sektor lingkungan dan sosial sebagai hal yang esensial.

Pembangunan berkelanjutan terdiri dari tiga dimensi: ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam komponen ekonomi, berbagai tujuan harus dipenuhi, antara lain langkah-langkah untuk mendorong pembangunan ekonomi, memerangi kemiskinan, serta mengalihkan produksi dan konsumsi ke arah yang lebih seimbang. Sementara itu, komponen sosial antara lain terkait dengan penanggulangan masalah kependudukan, peningkatan pelayanan masyarakat, dan peningkatan kualitas pendidikan. Sasaran dimensi lingkungan meliputi upaya untuk mengurangi dan menghindari pencemaran, pengelolaan limbah, dan konservasi/pelestarian sumber daya alam. Dengan demikian, tujuan pembangunan berkelanjutan difokuskan pada tiga dimensi tersebut di atas: keberlanjutan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, keberlanjutan kesejahteraan sosial yang adil dan merata (kemajuan sosial), pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia, dan keberlanjutan suatu sistem kehidupan yang harmonis dan seimbang secara ekologis (*ecological equilibrium*). (Pertiwi, 2017)

METODE PENELITIAN

Kajian dalam penulisan ini menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif. Kajian ini dilakukan dengan memaparkan fakta, situasi atau keadaan, fenomena, faktor, dan keadaan yang terjadi selama penelitian dilakukan serta menunjukkan sesuai temuan yang sebenarnya. Data yang dikumpulkan merupakan data sekunder, yang diperoleh dari literatur, jurnal, surat kabar, maupun Badan Pusat Statistik (BPS).

HASIL DAN PEMBAHASAN

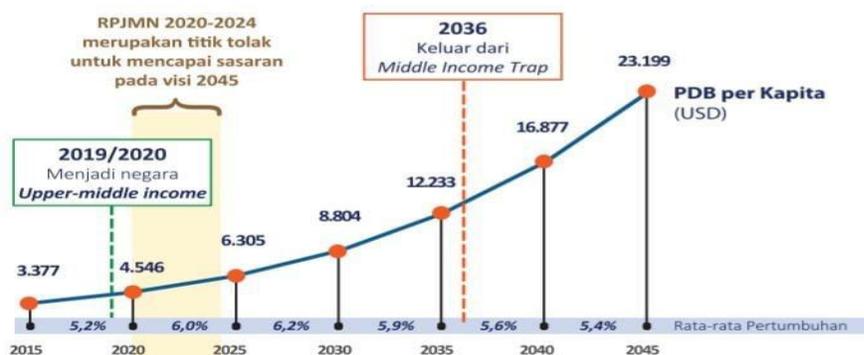
Memantau dan membandingkan tingkat kemiskinan secara internasional sangat penting untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Dunia Bebas Kemiskinan. Untuk menentukan tingkat kemiskinan parah di suatu negara, gunakan indikator proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan internasional, yang didefinisikan sebagai proporsi penduduk yang

hidup dengan kurang dari \$1,90 per hari dengan harga internasional. Pada harga internasional saat ini, "garis kemiskinan internasional" ditetapkan sebesar \$1,90 per hari.



Gambar 1. Garis Kemiskinan Internasional

Berdasarkan temuan Susenas, persentase penduduk miskin di Sumut dari tahun ke tahun semakin menurun. Persentase penduduk Sumut yang hidup di bawah garis kemiskinan sebesar 8,49 persen pada Maret 2022. Pencapaian ini masih menyisakan pekerjaan bagi pemerintah daerah, karena Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumut 2018-2023 menetapkan sasaran angka kemiskinan sebesar 7,39 persen. Oleh karena itu, pemerintah dan pemangku kepentingan Provinsi Sumut lainnya akan terus menjalankan berbagai program dalam upaya pengentasan kemiskinan guna mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 2030 secara tuntas, yaitu mewujudkan Sumut bebas kemiskinan.



Gambar 2. Target Pertumbuhan Ekonomi Menuju Indonesia Maju

Visi Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'rif Amin dengan visi "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan

Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua.

RPJMN 2020-2024 telah mengarusutamakan Sustainable Development Goals (SDGs). Target-target dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 agenda pembangunan Indonesia ke depan.

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup beberapa aspek, yaitu :

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia
Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.
2. Pembangunan Infrastruktur
Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
3. Penyederhanaan Regulasi
Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM
4. Penyederhanaan Birokrasi
Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi
5. Transformasi Ekonomi
Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan adanya arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 yang disampaikan oleh presiden, maka peran strategis pemerintah daerah provinsi sumatera utara dalam menopang pembangunan berkelanjutan di indonesia, dengan melakukan :(Republik Indonesia, 2020)

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui.

- a. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan.
- b. Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonisasi rencana pembangunan dan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan berkelanjutan dan inklusif melalui:

- a. Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah.
- b. Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang.

- c. Penguatan kemampuan SDM dan Iptek berbasis keunggulan wilayah.
- d. Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata.
- e. Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

- a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan.
- b. Penguatan pelaksanaan perlindungan social.
- c. Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta.
- d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas.
- e. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda.
- f. Pengentasan kemiskinan.
- g. Peningkatan produktivitas dan daya saing.

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilaksanakan secara terpadu melalui:

- A. Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila.
- B. Pemajuan dan pelestarian kebudayaan.
- C. Moderasi beragama.
- D. Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

KESIMPULAN

Tujuan pembangunan berkelanjutan difokuskan pada tiga dimensi tersebut di atas: keberlanjutan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, keberlanjutan kesejahteraan sosial yang adil dan merata (kemajuan sosial), pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia, dan keberlanjutan suatu sistem kehidupan yang harmonis dan seimbang secara ekologis.

Visi Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025 yang telah mengarusutamakan Sustainable Development Goals (SDGs). Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, transformasi ekonomi.

Dengan adanya arahan tersebut, maka peran strategis pemerintah daerah provinsi Sumatera utara dalam menopang pembangunan berkelanjutan di Indonesia dengan memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Terimakasih kami sampaikan kepada orang tua saya yang senantiasa mendukung dan mendoakan dalam rangka menyelesaikan segala tugas-tugas, terimakasih juga kepada saudara-saudara kandung kami yang selalu memberikan semangat dan men-support, terimakasih pula kepada sahabat-sahabat seperjuangan, serta dosen-dosen yang mengajar dan membimbing kami.

DAFTAR REFERENSI

- Ery, J. (2018). Hubungan Pertumbuhan Penduduk Dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Di Sumatera. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik Indonesia*, 4(2), 136–155.
- Bakri, S., & Setiawan, A. (2019). *Jasa Lingkungan Hutan: Kontribusi Produk Ekonomi-Ekologis bagi Pembangunan Berkelanjutan*.
- Fadilla, M., Fasa, M. I., & Suharto, S. (2022). *Peran Sumber Daya Alam Bagi Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia Dalam Perspektif Islam*. JEKSYAH: Islamic Economics Journal, 2(01), 54-63.
- M, R. (2018). Kebijakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan di Indonesia. *Kelola: Jurnal Sosial Politik*, 1(1), 148–163.
- Pertiwi, N. (2017). *Implementasi sustainable Development di Indonesia*. Pustaka Ramadhan.
- Pratiwi, N., Santoso, B., & Ashar. (2018). Analisis Implementasi Pembangunan Berkelanjutan di Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 18(1), 1–13.
- Purwandari, D. (2021). *PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DESA RAWAGEMPOL KULON. PROSIDING KONFERENSI NASIONAL PENELITIAN DAN PENGABDIAN UNIVERSITAS BUANA PERJUANGAN KARAWANG*, 1(1), 1328-1334.
- Republik Indonesia, P. (2020). LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL 2020-2024. In *National Mid-Term Development Plan 2020-2024*. <https://www.bappenas.go.id/id/data-dan...dan.../rpjmn-2015-2019/>
- Rosana, M. (2018). *Kebijakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan di Indonesia*. *Kelola: Jurnal Sosial Politik*, 1(1), 148-163.
- Rozikin, M. (2012). Analisis pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di Kota Batu. *Jurnal Review Politik*, 2(2), 219–243.
- Setianingtias, R., Baiquni, M., & Kurniawan, A. (2019). Pemodelan indikator tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 27(2), 61–74.
- Suparmoko, M. (2020). Konsep Pembangunan Berkelanjutan Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional dan Regional. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 9(1), 39–50.
- Suryono, A. (2010). *Dimensi-dimensi prima teori pembangunan*. UB press.
- Yanti, N., & Badriyah, N. *Implementasi Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan Hidup*.
-